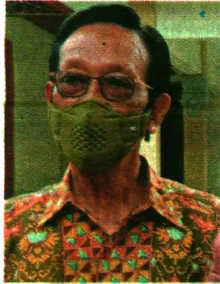




OTT EKS WALIKOTA YOGYA Sultan: Ikuti Proses Hukum



KR-Riyana Ekawati

Sultan HB X

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terhadap penangkapan eks Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/6) lalu terkait dugaan kasus suap. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, menurut Sultan, menunjukkan konsistensi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, Sultan meminta kepada pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena yang bersangkutan (Haryadi) telah melanggar janjinya sebagai

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Sultan:

Walikota Yogya periode 2017-2022 berkaitan dengan pakta integritas.

"Kalau soal kasus OTT terhadap mantan Walikota ya dihadapi saja proses hukumnya kalau memang melakukan. Karena Mas.Haryadi telah melanggar janjinya sendiri, kan sudah menandatangani pakta integritas, kan gitu. Jadi ya berproses saja sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," ujar Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (6/6).

Gubernur DIY menyayangkan, proses transaksi suap hingga berujung operasi OTT tersebut dilakukan di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta. Padahal Haryadi sudah puma tugas pada 22 Mei 2022 lalu.

Dengan temuan (OTT) tersebut,

Sultan juga menilai KPK konsisten menangkan pelanggar pakta integritas dan memprosesnya secara hukum. "Hanya masalahnya, beliau sudah pensiun kenapa pertemuan ada di Rumah Dinas Walikota yang sebetulnya dia kan sudah tidak berada di situ. Ini hanya teknis memang, yang penting kan persoalannya itu," ucap Sultan.

Sultan menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait pembangunan apartemen mana yang membuat Haryadi ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena tindak pidana korupsi dengan alasan apapun bertentangan dengan hukum, untuk itu supaya kasus serupa tidak terulang,

Sultan meminta kepada pejabat agar konsisten mentaati pakta integritas yang sudah ditandatangani, agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Sultan menambahkan, adanya kepala dinas di. Pemkot Yogya yang terseret dugaan kasus suap/korupsi perizinan IMB, pihaknya menyerahkan kepada Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta mengenai siapa yang akan mengisi jabatan sebagai pelaksana tugas harian (Plt) kepala dinas tersebut.

"Saat ini kepala dinas yang bersangkutan kan sudah ditahan, berarti ada Plt supaya perizinan berjalan. Tapi itu wewenangnya ada di Penjabat Walikota, Pak Sumadi," terangnya.

Sambungan hal 1

(Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005